

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lisnawati. et al. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia*. Serdang: Az-Zahra Media Society.
- Marbun, R. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Lampung: Aura.
- Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nusa, A. & Darmawati. (2022). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodipoetro, M. (1994). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Rasiwan, I. (2025). *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: DRA Cipta Kreasi.
- Rohmat, N. (2018). *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: K-Media.
- Shoim, M. (2022). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Sasmito, J. (2018). *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- Soesilo, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Sudaryanto, Agus. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, B. & Poerba, J. G. S. D. (2024). *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Perzinaan*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.

Jurnal

- Abdullah, S., Jum'ati, J., & Luhukay, R. S. (2023). Hubungan sedarah (incest) yang dilakukan suka sama suka pada usia dewasa: Perspektif tindak pidana kesusilaan. *Media Iuris*.
- Agus, P. A. F. (2025). Tinjauan yuridis tentang hukuman bagi pelaku hubungan inses di Indonesia. *Lex Privatum*.
- Ardiansyah, A., et al. (2023). Tindak pidana zina perspektif Qonun Jinayah Aceh. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Astuti, T. A. H., & Prabowo, A. (2024). Asas ultimum remedium dalam penegakan hukum tindak pidana kejahatan berbasis digital. *Iuris Studia*.
- Cahyadi, I. D. G. A. D., & Adiyaryani, N. N. (2025). Batasan asas dominus litis jaksa dikaitkan dengan asas diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Efrizon, E., Agisty, F., & Kasman, S. M. (2025). Budaya hukum di era digital: Implikasi sosial dan kultural media sosial dalam penegakan hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*.
- Fatoni, S., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O. (2025). Asas proporsionalitas: Perspektif hukum positif dan maqashid syariah dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Hamaminata, G. (2023). Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*.
- Hidayat, I. (2022). Keberadaan tindak pidana perzinaan dalam koridor pembaharuan hukum pidana. *Wajah Hukum*.
- Kurniawan, T., Sihombing, A. M., & Berliane, A. (2023). Konstruksi politik hukum pidana terhadap delik perzinaan dalam RKUHP. *Binamulia Hukum*.
- Khairuddin. (2024). Fenomena tren perceraian di Indonesia: Apa penyebabnya?. *Abdurrauf Science and Society*.
- Lubis, M. Y., et al. (2025). Maraknya perceraian akibat perselingkuhan di dunia kerja. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*.

- Manoppo, Y., Manoppo, B., & Lembong, R. (2022). Kebijakan hukum pidana dalam pemberian sanksi terhadap penanggulangan tindak pidana KDRT. *Lex Administratum*.
- Nasruddin, S., & Nurdaim, A. (2024). Tindak pidana zina menurut UU No. 1 Tahun 1946, UU No. 1 Tahun 2023 dan hukum Islam. *Journal of Law and Nation*.
- Nasrullah, & Rustam. (2023). Upaya penyidik mengungkap perselingkuhan dengan dugaan perzinahan. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Nusa, A., & Darmawati. (2024). Pokok-pokok hukum pidana dalam konteks pembaharuan KUHP. *Jurnal Hukum Progresif*.
- Rahardjo, A. R. (2025). Teori hukum law as a tool of social engineering dalam konteks Indonesia. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*.
- Santosa, R. (2020). Analisis yuridis tindak pidana inses menurut peraturan perundang-undangan nasional. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Sitepu, H. B., et al. (2021). Analisis yuridis pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap pencabutan pengaduan. *Juris Studia*.
- Sudarti. (2022). Tindak pidana perzinahan dalam Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor perspektif maqasid asy-syari'ah. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*.
- Syamsuddin, & Azizah, N. (2021). Kedudukan anak zina ditinjau dari yuridis normatif. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Syuhada, & Malahayati. (2024). Penegakan hukum terhadap jarimah zina di wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*.
- Tambunan, U. M., & Harahap, M. M. (2024). Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana incest terhadap anak di bawah umur. *UNES Law Review*.
- Winarso, C., et al. (2024). Hak waris anak di luar nikah menurut hukum perdata Indonesia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Website

Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024." *Badan Pusat Statistik*. Diakses 17 Desember 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.

Hukumonline. "Delik Aduan." *hukumonline.com*. Diakses 12 November 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-1t61b44d64b2813/?page=all>